SAAT TUBUHKU BUKAN LAGI MENJADI HAL PRIVAT: ANALISIS PEMIKIRAN MICHEL FOUCAULT TERHADAP KASUS KEKERASAN MEDIA KEPADA KELOMPOK MINORITAS GENDER DAN SEKSUAL DI INDONESIA

Lay Lukas Christian*
laylukas.christian@gmail.com

Abstract

It seems that the pandemic that hit Indonesia has not only attacked society in general but also gender and sexual minority groups in this country. Especially if we look at the media in the period 2019 to 2022. Many news cornered this group as carriers of disaster. The author tries to offer a new alternative in social life through the thoughts of Michel Foucault, a philosopher who tries to see this group as a victim of power relations from various sides, such as the government, religion, and even the media. This paper wants to show an alternative way of thinking to prevent this group from these various forms of violence. At the beginning of this paper, the author will describe Foucault's thoughts regarding the other to see the phenomenon of gender and sexual minority groups. Furthermore, the author will also describe the forms of violence that occurred in this group. And at the end of this paper the author finds that the relationship between individual bodies and power encourages groups in power to oppress these groups.

Keywords: Media, Violence, Sexual and Gender Minority Group, Michel Foucault.

Abstrak

Pandemi yang melanda Indonesia rupanya bukan hanya menyerang masyarakat secara umum tetapi juga kelompok minoritas gender dan seksual di negara ini. Apalagi jika melihat media pada periode 2019 hingga 2022.

* Mahasiswa Magister Filsafat Keilahian Universitas Kristen Duta Wacana.

Banyak berita yang menyudutkan kelompok ini sebagai pembawa bencana. Penulis mencoba menawarkan alternatif baru dalam hidup bermasyarakat melalui pemikiran Michel Foucault, seorang filsuf yang berusaha melihat kelompok ini sebagai korban relasi kuasa dari berbagai sisi, seperti pemerintah, agama, dan bahkan media. Tulisan ini ingin menunjukkan alternatif pemikiran untuk menghindarkan kelompok ini dari berbagai bentuk kekerasan tersebut. Pada awal tulisan ini, penulis akan menjabarkan pemikiran Foucault mengenai sang *liyan* untuk melihat fenomena kelompok minoritas gender dan seksual. Selanjutnya penulis juga akan memaparkan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada kelompok ini. Dan pada bagian akhir tulisan ini penulis menemukan bahwa relasi tubuh individu dan kekuasaan mendorong kelompok yang berkuasa untuk menindas kelompok ini.

Kata-kata kunci: Media, Kekerasan, Kelompok Minoritas Gender dan Seksual, Michel Foucault.

PENDAHULUAN:

Pandemi, Seksualitas dan Cerita di Baliknya

Pada bulan September 2020 yang lalu, masyarakat di Indonesia dihadapkan dengan berita yang mungkin "lebih panas untuk digoreng" dibandingkan dengan berita penemuan vaksin dan obat virus COVID-19. Entah apa yang menjadi alasan berita ini sempat menjadi viral dan cukup menghebohkan masyarakat Indonesia-utamanya di Jakarta-sehingga, dalam waktu kurang dari seminggu, berita ini begitu cepat tersebar untuk "dinikmati" oleh masyarakat Indonesia. Di Kuningan, Jakarta Selatan polisi menangkap dan menahan sembilan orang yang dianggap sebagai perancang pesta tersebut. Penulis mencoba menampilkan sedikit cuplikan berita yang dari sebuah laman berita *online* besar di Indonesia.

> "*Mirisnya, pesta gay tersebut dilakukan di tengah kondisi pandemi Corona yang sedang tinggi-tingginya di DKI Jakarta. Berdasarkan informasi dari Satgas Penanganan COVID-19, Selasa (1/9), DKI Jakarta menjadi provinsi terbanyak penambahan kasus Corona, yakni 901 kasus. Disusul Jawa Timur dengan 350 kasus.*

Penggerebekan pesta ini dirilis langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus"[1] (Dharmastuti, 2020).

Media tersebut memilih untuk menggunakan kata "miris" untuk menggambarkan pesta gay tersebut, dan terkesan memaksakan untuk dihubungkan dengan kondisi pandemi virus COVID-19, yang memang terjadi di Indonesia secara khusus dalam beberapa bulan ini. Kaum minoritas seksual (utamanya *gay*) ini dianggap bersalah sepenuhnya. Namun, apakah kata "miris" yang dalam KBBI menggambarkan perasaan cemas, waswas, dan risau itu telah tepat ditempatkan pada berita semacam ini? Dengan menggunakan kata "miris" untuk memulai beritanya, media tersebut seakan sepakat jika pesta tersebut telah membuat orang khawatir, cemas, dan risau di saat bangsa ini masih berhadapan dengan pandemi Corona. Penulis melihat adanya ketimpangan pandangan media dalam memberitakan berita-berita yang berkaitan dengan isu-isu ragam gender dan seksual akhir-akhir ini. Mungkin sebagian besar orang Indonesia lupa bahwa media sejatinya kurang memunculkan atau menganalisis rilis berbagai lembaga penelitian, tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan pada kaum heteroseksual lainnya yang juga terjadi pada masa pandemi *Corona* di tahun 2020 hingga saat ini. Bagi media Indonesia sekarang, mungkin isu tentang minoritas gender dan seksual akan lebih "*crispy*" untuk digoreng, dibandingkan dengan usaha sebagian besar masyarakat Indonesia untuk bertahan hidup di tengah pandemi. Isu ini akan membuat tingkat pembaca di laman mereka semakin tinggi dan diperhatikan oleh masyarakat pada umumnya.

Rupanya, berita ini bukanlah berita satu-satunya yang menyudutkan kelompok minoritas gender dan seksual. Surya Samudra Giamsjah dalam Asnath Niwa Natar (2020:233) mencatat bahwa setahun sebelumnya, kasus RS di Inggris telah mengagetkan publik Indonesia pada tahun 2019. RS, yang adalah seorang mahasiswa Indonesia yang sedang melanjutkan kuliah di Inggris, dikabarkan telah melakukan pemerkosaan kepada tidak kurang dari 160 orang. Hal yang lebih mengejutkan publik adalah kenyataan bahwa kesemua korbannya adalah laki-laki. Isu ini pun berkembang dengan pesat di media nasional Inggris dan media internasional. Akibatnya, banyak masyarakat yang telah mengalami disorientasi dan kegagalan fokus dalam menerima berita tentang RS, utamanya di media sosial.

Isu seperti penyimpangan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis, seringkali menjadi topik yang diangkat lebih tinggi dalam media. Orang Indonesia kerap kali menganggap mereka yang berada dalam kelompok minoritas gender dan seksual sebagai "penjahat kelamin". Seksualitas manusia yang berbeda, ternyata tidak hanya antara sesama jenis, bahkan saat ini, berbagai macam bentuk seksualitas yang ditemukan. Setidaknya, menurut Asnath Niwa Natar dalam Natar (2020:35-37), terdapat empat belas jenis orientasi seksual yang sampai diketahui hingga saat ini. Secara khusus orientasi seksual dapat diartikan sebagai ketertarikan secara seksual, emosional, dan jenis kelamin orang lain.

Irisan antara seksualitas dengan teologi juga terus didengungkan oleh berbagai aliran gereja. Beberapa waktu belakangan, tentu pembaca dan penulis tidak asing dengan Pernyataan Pastoral PGI tentang isu LGBT pada 28 Mei 2016. Dalam surat pernyataan nomor 360/PGI-XVI/2016, PGI menyatakan bahwa:

> *"LGBT pada dirinya sendiri bukanlah sebuah persoalan. LGBT menjadi persoalan karena kitalah yang mempersoalkannya. Kitalah yang memberi stigma negatif. Oleh karena itu dibutuhkan sikap yang matang , rendah hati, rasional, serta kemampuan bersikap adil dalam menyikapi kasus ini. Kita harus menjauhkan diri dari kecenderungan menghakimi atau menyesatkan siapa pun. Sebaliknya, kita harus belajar membangun persekutuan bangsa dan persekutuan umat manusia yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan."*[2]

Dalam surat pastoralnya, PGI merekomendasikan sebuah saran untuk tidak memberikan stigma negatif bagi kelompok minoritas gender dan seksual. Sebagai persekutuan "yang mengaku" inklusif, gereja diminta untuk tetap memberikan kesempatan agar kelompok ini mampu untuk berkembang dan bertumbuh sebagai manusia yang utuh secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Oleh karenanya, PGI merekomendasikan konstruksi teologis mengenai "kasih Allah" untuk dapat menghindarkan pelabelan dan stigma negatif bagi mereka yang memiliki orientasi seksual dan gender yang berbeda.

Namun pada kenyataannya, pernyataan pastoral PGI ini tetaplah hanya sebagai sebuah saran bagi beberapa sinode gereja. Mereka tetap pada posisi menolak pendeta, pelayan gerejawi, dan bahkan jemaat yang telah membuka dirinya sebagai salah satu kelompok minoritas gender dan seksual. Melihat kenyataan ini, penulis berusaha menggunakan pemikiran seorang filsuf postmodenisme bernama Michel Foucault untuk membaca fenomena dan mengkaitkannya dengan keberadaan kelompok minoritas gender dan seksual utamanya di Indonesia.

PEMBAHASAN:

Metode Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan pemikiran Michel Foucault untuk membaca dan menangkap fenomena serta makna baru keberadaan kelompok minoritas gender dan seksual di Indonesia. Langkah pertama yang penulis lakukan adalah dengan memahami pemikiran dan pandangan Michel Foucault secara umum. Langkah kedua yang penulis lakukan adalah mencoba menggali fenomena kelompok ini dari berbagai sudut pandang, utamanya agama, sosial, dan media. Selanjutnya pemikiran dan pemahaman Foucault ini akan penulis gunakan untuk membaca kembali fenomena tindak represi kelompok minoritas gender dan seksual di Indonesia.

Sekilas tentang Michel Foucault dan Hermeneutiknya

Michel Foucault dikenal sebagai seorang filsuf Perancis yang mengajar di College de France sejak 1971 hingga kematiannya pada Juni 1984. Ia merupakan pendiri divisi eksperimen Universitas Vincennes dan menempati kursi kehormatan Sejarah Sistem Pemikiran di College de France. Beberapa tulisan karyanya pun menjadi penting bagi dunia pengetahuan post-modern. Beberapa karya Foucault tersebut di antaranya adalah: Arkeologi Pengetahuan (1969), Tatanan Diskursus (1970), Disiplin dan Hukuman (1975), Kehendak untuk mengetahui: Sejarah Seksualitas I (1976), dan masih banyak lagi. Bagi Foucault, berfilsafat adalah mengurai sejarah gagasan bukan untuk meyakinkan diri akan kebenarannya, namun untuk mengenali urutan, dan cara pengujaran yang mengungkapkan pembenaran dan penyangkalan, yang mengatakan hal yang dapat diterima dan yang tidak dapat

ditolerir. Ia berusaha untuk menyampaikan pemikiran kebenarannya, melalui konsep kegilaan, kekuasaan, seks, dan sudut pandang esensinya masing-masing. Pada bagian ini, penulis akan berusaha untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran Foucault, utamanya mengenai seks dan kekuasaan.

Dalam bukunya yang berjudul *Arkeologi Pengetahuan,* Foucault (2012:354) sendiri cenderung untuk mengunggulkan "kekuasaan mikro", "kekuasaan kontra", yang membentuk seluruh fisik mikro dari berbagai kekuasaan. Foucault juga dinilai telah memicu suatu revolusi teori yang tidak hanya melawan berbagai teori borjuis tentang negara, tetapi juga menentang konsepsi Marx mengenai kekuasaan dan hubungannya dengan negara. Ia juga menyatakan bahwa, bukanlah pengertian dari kebenaran itu yang menjadi masalah untuknya, tetapi kondisi yang diperlukan untuk mencapai "kebenaran" tersebut. Ia sangat tertarik dengan pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial. Baginya, ilmu-ilmu sosial memiliki epistemologinya sendiri, sehingga ia kemudian terjun untuk bukan hanya mendalaminya, tetapi juga mengkritik, dan memberikan pemikiran baru nan segar terhadap epistemologi ilmu sosial tersebut. Foucault juga menganggap bahwa kebenaran adalah hasil dari suatu rezim. Jika demikian, maka kita dapat berpikir bahwa kebenaran yang kita pegang atau percaya saat ini juga merupakan hasil dari kekuasaan suatu rezim. Kita sering kali mengajukan banyak konsep dan pengertian yang diterima baik oleh mereka yang menjelaskan bahasa, mitos, atau karya-karya sastra, dan berbicara tentang formasi, positivitas, pengetahuan, dan lainnya, yang secara tidak sadar sebenarnya telah membentuk perdebatan, antara menggunakan analisis struktural, yang merupakan hasil penelitian dibandingkan sebagai sebuah prinsip utama. Acap kali kita juga terjebak untuk mereduksi dimensi yang sesuai dengan diskursus, mengabaikan ketidaknormalan, dan justru menciptakan ketidakseimbangan itu sendiri. Cara inilah yang sering kali mencoba "menutup keterbukaan" ilmu pengetahuan itu sendiri. Mungkin, pemikiran inilah yang menjadi salah satu alasan Foucault juga seringkali dianggap sebagai seorang filsuf postmodernis, yang mengambil posisi sebagai lawan dari Habermas dan para pendukung modernitas (Hardiman, 2003:152). Foucault berpendapat bahwa, perkembangan ilmu-ilmu kemanusiaan modern memiliki keterkaitan yang erat dengan praktik-praktik pendisiplinan dan penyingkiran "ketidakwarasan", yang kemudian dinilai

sebagai "praktek eksklusi mental" dimana rasio dan logika-logika modern hadir untuk berkuasa. Hardiman (2003:160) juga menyatakan bahwa, Foucault menilai "kehendak untuk berkuasa" kemudian berganti dengan "kehendak-untuk-kebenaran" yang sebenarnya, sama saja, dan tidak mengubah kuasa tersebut dalam pengetahuan.

Dalam masa awal agama Kristen terbentuk, kewajiban mengatakan kebenaran mengenai diri sendiri, mengambil dua bentuk utama yaitu: *exomologesis*, dan *exagoreusis*. Keduanya, dinilai oleh Foucault sebagai dua hal yang sangat berbeda. *Exomologesis* merupakan ungkapan dramatis orang yang bertobat terhadap statusnya sebagai pendosa dan menjadikannya semacam manifestasi publik. Sedangkan, *exagoreusis* menggambarkan seseorang yang memiliki verbalisasi analitis dan terus menerus terhadap pikiran. Dengan kata lain, *exagoreusis* ingin menunjukkan verbalisasi atas kepatuhan penuh kepada kehendak sang bapa spiritual. Jika *exomologesis* muncul pada agama Kristen era awal dimana terdapat adanya gerak bolak-balik antara teknologi kebenaran diri yang diarahkan kepada penampakan sang pendosa, maka berbeda dengan *exagoreusis* yang menyebut teknologi diri yang diarahkan kepada analisis permanen dan diskursif terhadap pikiran. Berbagai metode hermeneutis, menurut Foucault diturunkan dari *exagoreusis* dimana produksi kebenaran tidak dapat dilakukan. Artinya tanpa syarat yang sangat ketat, hermeneutika diri Foucault ini menyiratkan sebuah pengorbanan diri.

Pemikiran Foucault

Menurut Hardiman (2003:186), Foucault nampaknya mengambil metode dalam pemikirannya yang menolak keras tema-tema, seperti: refleksi diri, subjektivitas, pencarian asal usul dan humanisme, dari penolakan ini, kita dapat melihat, bahwa Foucault lebih memilih untuk mengambil metode "genealogi". Bagi Foucault, kebenaran harus dipahami sebagai suatu sistem prosedur-prosedur yang teratur bagi produksi, pengaturan, distribusi, sirkulasi dan operasi-operasi pernyataan. "Kebenaran" selanjutnya dihubungkan dalam relasi sirkular dengan sistem-sistem kuasa yang menghasilkan, mempertahankan, dan dihubungkan pada efek-efek kuasa yang dipengaruhinya dan yang meluaskannya.

Widyarsono dalam Hardiyanta (1997:13) mengutip Davidson yang mengatakan bahwa hipotesis Foucault yang pertama merupakan interpretasinya tentang metode arkeologinya, sedangkan yang kedua adalah tentang genealogisnya. Hipotesis arkeologinya adalah bahwa kebenaran dipahami sebagai suatu sistem prosedur yang teratur dari produksi hingga operasi pernyataan. Hipotesis ini berusaha ia tunjukkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki klaim status kebenaran, sejarah dari prosedur yang teratur tersebut. Hal ini membuat seseorang harus membatasi diri pada bentuk tertentu dari praktek yang diskursif, seperti: pembatasan lingkup objek, definisi perspektif yang legitim bagi agen pengetahuan serta penetapan norma bagi suatu konsep dan teori. Praktek ini membuat orang harus membatasi permainan ketentuan dan merancang batasan dan pilihannya. Bagi Foucault, ia perlu untuk mengakhiri suatu historiografi global, yang mengkonseptualkan sejarah sebagai suatu kesadaran makro. Dan menawarkan metode yang kedua, yaitu genealogi.

Menurut Davidson, genealogi ini memiliki cakupan yang lebih luas daripada arkeologi yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Pusat perhatian genealogi adalah hubungan timbal balik antara sistem kebenaran dan mekanisme kuasa, yang di dalamnya rezim politis lah yang memproduksi kebenaran tersebut, dengan metode ini, Foucault ingin meninggalkan "presentisme" kesadaran waktu modern. Presentisme sendiri, diartikan oleh Foucault sebagai kesadaran bahwa masa kini itu unik dan langka, terpenting dan berkaitan dengan desakan tanggung jawab akan masa depan. Dengan demikian, genealogi, tidak lagi mencari asal usul, melainkan menemukan awal-awal dari pembentukkan diskursus, menganalisis pluralitas sejarah kemunculan mereka secara faktual, dan melepaskan diri dari ilusi tentang identitas (Widyarsono dalam Hardianta, 1997:14). Gambaran dari Widyarsono ini secara lebih jelas dapat dibaca menggunakan pendapat Foucault (2001:504) sebagai "*meditation of death"*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

> *What gives the meditation on death its particular value is not just that it anticipates what opinion generally represents as the greatest misfortune; it is not just that it enables one to convince oneself, that death is not an evil; rather, it offers the possibility of looking back, in advance so to speak,*

> *on one's life. By considering oneself as at the point of death, one can judge the proper value of every action one is performing.*[3]

Genealogi Foucault sendiri semacam sejarah yang melukiskan pembentukkan macam-macam pengetahuan, diskursus, dan objek-objeknya. Namun, sejarah ini, menurutnya tidak memburu makna berdasarkan kontinuitas kausal yang mengarah pada suatu *telos* tertentu. Genealogi justru merupakan pemutusan kontinuitas sejarah. Maka, historiografi Foucault adalah suatu sejarah tanpa subjek, karena subjektivitas hanya menggiring kita pada dominasi yang mengakibatkan upaya restorasi Logos yang berbahaya. Penyelidikan ilmu-ilmu positif menghadirkan tubuh sebagai objek penelitian mereka. Tubuh menjadi wilayah relasi kuasa berjalan atasnya. Tubuh menjadi kekuatan berguna sejauh merupakan tubuh yang produktif dan 'tunduk'. Penaklukan atas tubuh juga menjadi pengetahuan akan tubuh, yang kemudian keduanya menegakkan teknologi politis terhadap tubuh tersebut. Perkembangan politis inilah yang mampu menunjukkan bahwa kuasa secara aktual diartikulasikan dalam tubuh. Kuasa yang dilaksanakan di dalam tubuh ini menandai tubuh bukan sebagai milik, tetapi sebagai sebuah strategi (Widyarsono dalam Hardianta, 1997: 28-30).

Pemikiran dan Metodologi Penelitian Foucault tentang Tubuh

Dalam salah satu pemikirannya, Foucault menjelaskan:

> "*Tubuh sosial inilah yang perlu dilindungi, dalam pengertian kuasi-medis. Sebagai ganti ritual yang digunakan untuk memperbaiki integritas badani sistem monarki. Sebaliknya tubuh masyarakatlah yang menjadi prinsip baru pada abad kesembilan belas tubuh sosial inilah yang perlu dilindungi, dalam pengertian kuasi-medis. Sebagai ganti ritual yang digunakan untuk memperbaiki integritas badani sistem monarki, resep-resep pengobatan dan sarana tetapi dimanfaatkan sebagai pemisahan terhadap yang sakit, pengawasan terhadap yang tertular, dan pengucilan terhadap yang melanggar. Penghilangan elemen-elemen kekerasan melalui supplice (siksaan dan eksekusi publik) diganti oleh metode sterilisasi-kriminologi, ilmu genetika, dan pengarantinaan "orang-orang jompo".*[4]

Tubuh inilah yang menjadi perhatian Foucault. Medis dan hukum tiba-tiba saja menjadi penguasa atas segalanya, termasuk yang berkaitan dengan tubuh. Teknologi-teknologi medis secara sosial memiliki kuasanya tersendiri. Mereka yang menjadi "raja" atas tubuh. Penguasaan tubuh akan tubuh ini, dikatakan oleh Foucault sebagai efek dari investasi kekuasaan dalam berbagai bidang. Tubuh sendiri digambarkan akan terus menerus melawan kekuasaan, melawan sistem sosial yang dominan dalam masyarakat. Tubuh tidak lagi menjadi "target" penghukuman, tetapi menjadi instrumen atau media, serta menandai sebuah moralitas baru (Widyarsono dalam Hardianta, 1997:25). Kekuasaan pun tidak tinggal diam, ia, yang terbuka dengan berbagai macam serangan itu, kemudian menyusun dan mengumpulkan kembali kekuatannya, hingga muncul kekuasaan yang baru, yang nantinya akan kembali melawan kebebasan tubuh itu. Hal ini akan selalu terjadi secara bolak-balik.

Perkembangan dunia Barat, kemudian menyebabkan seksualitas kemudian menjadi sebuah objek analisis, objek perhatian, objek pengawasan, dan objek kontrol, yang menyebabkan intensifikasi hasrat individu, untuk, dalam, dan terhadap tubuhnya sendiri. Munculnya fenomena seksualitas pada anak-anak di Amerika Serikat, menyebabkan tubuh menjadi tempat konflik antara orang tua "yang memiliki kuasa" dengan anak-anak. Akibatnya, terdapat pemberontakan tubuh sosial ini. Kekusaan kemudian menanggapinya dengan suatu eksploitasi dan erotisisasi yang bersifat ekonomis. Pemberontakan tubuh ini kemudian menjadi bentuk kontrol yang baru. Kontrol, yang bukan lagi kontrol, tetapi lebih mirip dengan sebuah stimulasi. (Foucault, 2002:72)

Foucault (2002:73-74) melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan, "Pada kenyataannya, tidak ada yang lebih bersifat material, fisik, dan bertubuh dibandingkan dengan pelaksanaan kekuasaan. Model investasi tubuh seperti apakah yang diperlukan dan cocok untuk memfungsikan masyarakat kapitalis?" Penanaman investasi tubuh ini memang berjalan lambat, sehingga sebuah bentuk kedisiplinan muncul di berbagai konteks masyarakat, yang kemudian dapat kita lihat pada masa masyarakat industri. Oleh karenanya, kontrol akan tubuh pun diperlonggar, dan diberi bentuk yang baru.

Menurut Foucault, tidak ada praktek pelaksanaan kuasa yang tidak memunculkan pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan yang di dalamnya tidak mengandung relasi kuasa. Jadi bukanlah aktivitas yang menghasilkan tubuh pengetahuan, melainkan sebuah relasi antara kuasa dan pengetahuan itu sendiri (Widyarsono dalam Hardianta, 1997:30). Foucault secara lebih mendalam berusaha untuk meneliti perubahan-perubahan bentuk metode menghukum berdasarkan suatu konsep politis terhadap tubuh. Ia hendak melihat keterkaitan antara bentuk penaklukan atas tubuh, dan segala hal yang menjadi turunannya, termasuk di dalamnya seksualitas.

Relasi Seksualitas dan Kekuasaan

Saat penulis mencoba membahas tentang Foucault dan pemikirannya tentang tubuh, maka penulis juga tidak dapat melepaskan diri dari pemikiran Foucault yang lain tentang seksualitas. Dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Seksualitas dan Kekuasaan*, Foucault (1997:22-26) menyebutkan bahwa pada abad ke-17, pembicaraan tentang seksualitas harus dengan ketat dibatasi, karena bagi para pemilik kuasa masa itu, baik kuasa dalam bidang politik, hukum dan moral, pendidikan, dan lain sebagainya, seksualitas merupakan suatu hal yang tabu. Oleh karenanya, pembicaraan tentang seksualitas pun sangat dibatasi, atau bahkan direpresi. Pembatasan ini terus berlanjut tiga abad setelahnya. Hingga kemudian muncullah wacana untuk memberikan tempat pada seks, dan keragamannya di tengah para pemikir masa itu. Wacana ini jelas menimbulkan perdebatan yang cukup panjang. Penulis mencurigai hal ini dapat terjadi hingga saat ini, dimana seksualitas seharusnya dipertemukan dengan ilmu pengetahuan. Beberapa pemikir abad itu, bukan hanya menganggap seksualitas sebagai sesuatu yang tabu. Bagi mereka, seksualitas adalah sesuatu yang perlu dibungkam secara mutlak. Penyebabnya adalah norma kesantunan yang seakan telah menjadi senjata utama para pembungkam seksualitas itu. Norma ini seakan telah menjadi polisi bagi keteraturan masyarakat. Para “polisi” tersebut memang hanya dapat mengendalikan, namun bagi Foucault, bahasa lah yang menantang orang untuk mengakui dosa dan seksualitasnya. Para pengikut kontra reformasi inilah yang membuat seksualitas semakin dianggap tabu, dan harus diakui secara umum oleh para pelakunya. Hal ini kemudian membuat seksualitas juga berlindung pada tameng bahasa agar ia dianggap suci, dan

terpelihara dengan baik. Secara tidak langsung, mungkin kita dapat menggambarkan bahwa seks dan seksualitas sedang direpresi oleh para penguasa ilmu pengetahuan.

Akibatnya, seks yang sejak abad klasik mengalami peningkatan pembicaraan yang konstan itu mengharapkan adanya wacana analitis yang melipatgandakan nafsu birahi melalui pengalihan, intensifikasi, reorientasi, dan modifikasi. Pada abad ke-delapan belas, seks menjadi urusan dari "polisi", yang adalah pengokoh, dan peningkat kekuatan negara dengan alih senjata peraturan. Mereka harus mengurusi sepenuhnya segala sarana dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan umum, yang hanya dapat dicapai dengan menggunakan pengetahuan tentang kelebihan yang beragam. Artinya, bukan hanya tentang pentabuan, seks juga harus menghadapi fakta bahwa pengetatan ini dianggap berguna dan terbuka (Foucault, 1997:29)

Foucault (1997:29-30) juga menambahkan bahwa Hal-hal yang tabu inilah yang kemudian harus dianalisis, sebagai tameng dari pengendalian kelahiran. Inilah paling tidak, sebuah langkah pertama bahwa masyarakat secara konstan menegaskan bahwa masa depannya dan kekayaannya tidak hanya tergantung pada jumlah dan mutu warganya, tidak hanya tergantung pada lembaga perkawinan dan institusi keluarganya, tetapi juga pada cara setiap anggota masyarakat mendayagunakan seksnya. Dari sinilah kemudian muncul analisis perilaku seksual, definisi dan dampaknya, pula perbatasan antara biologi dan ekonomi. Kampanye sistematis ini kemudian mencoba untuk mengubah tingkah laku seksual menjadi perilaku ekonomis-politis yang terencana. Seks menjadi pertaruhan antara wacana, pengetahuan, analisis, dan perintah yang telah turut ambil bagian di dalamnya.

Sejak abad kedelapan belas pula, lembaga pendidikan telah memperbanyak bentuk-bentuk wacana tentang seks, serta menetapkan patokan-patokan baru, membakukan isinya, dan melantik banyak ahli untuk berbicara tentang seks pada anak dan remaja. Akibatnya, terjadilah penataan mekanisme kelembagaan dan strategi kewacanaan yang semakin tak terkendali jumlahnya. Selain dengan urusan pedagogi, seks juga menimbulkan wacana di berbagai bidang, seperti: kedokteran, psikologi, hukum dan peradilan, dan menempatkan mereka sebagai sang pemegang kontrol seks dan segala jenis turunannya. Merekalah yang mampu

memberikan label, tabu atau tidak, benar atau tidak, dan berbagai penilaian yang diberikan kepada segala jenis seks dan turunannya tersebut. (Foucault, 1997:34-35)

Bahkan fungsi kekuasaan pada seksualitas, tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Foucault (1997:50-57) menganalisis, terdapat empat operasi yang sangat berbeda, dari sekedar larangan biasa. *Pertama*, larangan terhadap hubungan sedarah, serta kutukan yang mengikutinya. Dimanapun kenikmatan seksual menyimpang itu berpeluang untuk diwujudkan, telah ditempatkan sarana pengawasan yang ketat, lengkap dengan perangkap-perangkap sosial yang mengikutinya. Hal ini membuat orang tua, yang merasa bahwa ia adalah pemilik tubuh anaknya itu memasang perangkap pidato , dengan alih untuk mendidik anak-anak tersebut. Berbagai macam intervensi medis dan sekaligus seksual masuk ke dalam sendi-sendi keluarga.

Kedua, perburuan atas seksualitas pinggiran, kemudian menimbulkan *inkorporasi perversitas* dan *spesifikasi baru individu-individu.* Homoseksualitas misalnya, pada abad kesembilan belas sudah menjadi tokoh yang memiliki kisah pengalaman, suatu sifat, gaya hidup, hingga anatomi dan fisiologi yang penuh misteri. Seksualitas tidak dapat dipisahkan dari sosok homoseksual dan lebih merupakan kodrat khasnya daripada suatu kebiasaan yang mengandung dosa. Pengkategorian homoseksualitas pun dilakukan oleh ilmu-ilmu yang telah kita kenal, seperti: psikologi, psikiatri, hingga medis. Mereka sepakat untuk menggambarkan bahwa homoseksualitas memang adalah sebuah kodrat khas, daripada kebiasaan yang mengandung dosa. Homoseksual lebih dianggap sebagai satu ciri kualitatif khas dari kepekaan seksual, yaitu satu cara untuk mengubah maskulinitas dan femininitas dalam diri sendiri. Foucault (1997:58) juga menjelaskan, bahwa keberadaan homoseksualitas muncul sebagai salah satu bentuk seksualitas ketika dialihkan dari praktik sodomi menjadi semacam androgini batin, hermaprodhisme jiwa. Saat direlasikan dengan kekuasaan, misalnya dengan para psikiater, seks yang sering dinamakan “menyimpang” ini, seharusnya ditumpas, walaupun sebenarnya kekuasaan juga memberi kepada penyimpangan itu suatu eksistensi yang kasat mata, dan karenanyalah seringkali perilaku seks yang “menyimpang” ini menjadi objek bagi keteraturan dari kegalauan.

Ketiga, kekuasaan mensyaratkan kedekatan; mengandalkan pemeriksaan fisik dan pengamatan yang sangat cermat ; menuntut pertukaran wacana, melalui berbagai pertanyaan yang mengorek pengakuan yang melebihi interogasi. Namun setelah menjadi hal medis, maka kekuasaan harus dicari. Jika kekuasaan merangkul seluruh tubuh seksual, maka terjadilah sensualitas kekuasaan dan manfaat dari kenikmatan. Dalam hal kenikmatan seksual, kekuasaan berfungsi sebagai sebuah mekanisme panggilan yang menarik, dan berusaha menyingkirkan sementara berbagai keanehan yang diawasinya. Kenikmatan menyebar pada kekuasaan yang mengungkungnya; dan kekuasaan memberi dasar yang kuat kepada kenikmatan yang baru saja dihalaunya (Foucault, 1997:58-59).

Terakhir, menurut Foucault (1997: 59-60), inilah asal muasal strategi penjenuhan seksual yang begitu khas dalam ruang dan ritus sosial abad ke-sembilan belas. Masyarakat modern telah menyempitkan seksualitas hanya pada pasangan-pasangan heteroseksual, dan juga sah. Di dalamnya kita dapat melihat, masyarakat juga mengatur dan menciptakan sendiri serta membiakkan berbagai kelompok yang multi mitra dan gemar bertukar pasangan. Maka kemudian terjadilah suatu distribusi titik-titik kekuasaan yang berhierarki atau bertentangan satu sama lain. Akhirnya pada masa ini, keluarga atau rumah tangga dianggap sebagai sel monogami dan sel perkawinan. Namun dibaliknya, keluarga juga merupakan sebuah jaringan kenikmatan-kekuasaan yang baru. Jika semua seksualitas itu dipersempit sedemikian rupa pada hubungan perkawinan walaupun hubungan-hubungan itu telah diproyeksikan sebagai hasrat terlarang maka tetap saja, keluarga belum atau bahkan tidak mampu memperhitungkan organisasi yang dibandingkan dengan ragam seksualitas itu. Lembaga-lembaga seperti sekolah dan psikiatri memainkan kekuasaan mereka dengan merancang berbagai macam ruang yang jenuh seksualitas seperti: ruang kelas, asrama, kunjungan, atau konsultasi.

Kekuasaan berfungsi sebagai demultiplikasi berbagai seksualitas yang khas, dan tidak menetapkan batas-batas yang jelas pada seksualitas itu sendiri dan malah memburunya melalui jalur-jalur penetrasi yang tak pasti bentuknya. Bersamaan dengan seksualitas yang “berkembang biak”, kekuasaan pun meningkat, di wilayah-wilayah penerapan seksualitas

tersebut. Maka, Foucault (1997:94) menyimpulkan bahwa pemikiran tentang represi seksualitas yang luas pada masa modern dapat dilihat sebagai suatu ledakan seksualitas bid'ah yang tak kasat mata.

Keberadaan Kelompok Minoritas Gender dan Seksual

Kelompok minoritas seksual dan gender pada dasarnya telah ada dan nyata di tengah-tengah masyarakat sebagai sang liyan. Mereka dianggap tidak memiliki hak untuk "berkuasa" atas pilihan seksualitas mereka. Kelompok ini bukan hanya dipinggirkan oleh masyarakat, tetapi juga mengalami berbagai kekerasan verbal dan non-verbal. Kenyataan atas kekerasan terhadap kelompok ini membuat penulis berpikir, "Dimanakah hak mereka atas tubuh mereka sendiri? Siapakah yang berkuasa atas kebertubuhan mereka?" Pemikiran ini pula yang pernah disampaikan oleh Foucault:

> *The critical ontology of ourselves has to be considered not, certainly, as a theory, a doctrine , nor even as permanent body of knowledge that is accumulating; it has to be conceived as an attitude, an ethos, a philosophical life in which the critique of what we are is at one and the same time the historical analysis of the limits that are imposed on us and an experiment with the possibility of going beyond them … I continue to think that this task requires work on our limits, that is, a patient labor giving form to our impatience of liberty.*[5]

Foucault berusaha untuk menyampaikan pemikirannya tentang kebebasan tubuh dan seksualitas, yang direpresi sedemikian rupa oleh kekuasaan. Rupa kekuasaan yang merepresinya pun beragam. Berbagai ilmu pengetahuan berusaha untuk menguasai seks dan seksualitas, termasuk pula merepresi seksualitas yang berbeda, dan menyatakan mereka sebagai yang "berbeda", "sang liyan", dan harus disingkirkan.

Sebut saja dalam ilmu agama. Seksualitas dianggap normal apabila dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan. Hubungan seks yang tidak normal akan mendapatkan hukuman dari yang menciptakan seks itu. Banyak teks dalam Alkitab yang kemudian menjadi pegangan bagi para teolog untuk membenarkan pemikiran ini. Namun, terdapat pula teks-teks yang menjadi pegangan para ahli teologi untuk menyetujui keberadaan kelompok minoritas

seksual dan gender sebagai kekayaan seksualitas itu sendiri. Sebagai sebuah contoh yang kerap menjadi perdebatan adalah teks Kejadian 19:1-29, tentang Sodom dan Gomora. Banyak teolog Kristen yang menganggap teks ini adalah bukti "kejahatan seksual" yang dilakukan para laki-laki Sodom kepada Lot, keponakan Abraham itu. Namun, benarkah demikian?

Silva S. T. Ngahu (2019) menyatakan bahwa masalah utama Sodom dan Gomora dalam Kejadian 19:1-26, sebenarnya adalah masalah keramahan orang Sodom terhadap pendatang. Pemikiran Ngahu ini tidaklah satu-satunya. Namun, Ngahu juga mengakui bahwa bentuk seksualitas yang lain, atau yang berada di luar heterosentris itu dapat juga dianggap menyimpang. Karena anggapan penyimpangan inilah, seksualitas yang berada di luar "kenormalan" itu mendapatkan diskriminasi. Hulman Sinaga, dalam Natar (2020:10-12) berpendapat jika para pembaca teks memperhatikan konteks dari teks ini, maka terdapat beberapa hal yang kemudian memperkuat argumen dari Ngahu. *Pertama*, permintaan orang Sodom kepada Lot dalam teks tersebut adalah untuk mengenal tamunya tidak secara langsung merujuk pada orientasi serta perilaku homoseksual. Wacana yang dimunculkan, kemungkinan mereka memiliki ketertarikan biseksual, sebab Lot menawarkan anaknya perempuan. *Kedua*, konteks perikop ini tampaknya menyatakan, bahwa bukan hanya laki-laki saja yang mendatangi rumah Lot, tetapi perempuan dan juga anak-anak. Lalu, apakah semua orang yang datang ke rumah Lot saat itu adalah laki-laki? Rasanya juga tidak. *Ketiga*, argumen bahwa orang Sodom datang ke rumah Lot saat itu juga bukanlah karena tamu Lot adalah laki-laki. Tetapi karena mereka datang sebagai orang asing. Lot yang adalah orang asing membawa orang asing lainnya ke dalam kota Sodom, tentu hal ini membuat orang di sekitarnya menjadi curiga. Dan karena kecurigaan inilah mereka mendatangi Lot, namun karena tanggapan Lot yang ingin "melindungi" tamunya tersebut, kecurigaan orang Sodom pun berubah menjadi keberingasan dan mungkin saja sampai pada kekerasan fisik. Namun, walaupun sedemikian panjang penjelasan tentang agama dan kelompok minoritas seksual dan gender, bagi Gisela Dea Nirwanto (2016) keberadaan bingkai sosial yang menganggap semua agama bertentangan dengan kelompok ini, membuat mereka semakin termarginalkan. Nada-nada negatif tentang mereka muncul secara tidak berimbang di lingkungan agama dan masyarakat.

Bidang ilmu lain yang menyoroti masalah seksualitas dan gender yang berada di luar kenormalan adalah ilmu sosiologi. Penelitian yang dilakukan oleh Puji Rahayu, Rina Satriani, dan Hamada Adzan Mahaswara (2012) menyimpulkan bahwa, kelompok *gay* (laki-laki yang suka dengan laki-laki) lebih nyaman untuk menggunakan *dating application*. Penelitian ini menemukan, bahwa kelompok *gay* yang masuk dalam kelompok rentan sosial ini membutuhkan pengakuan dan pemaknaan identitas yang menjamin eksistensi seseorang. Hal ini diperkuat oleh Rahardjo (2007). Ia melihat kelompok minoritas gender dan seksual berjuang untuk mendapatkan tempat di masyarakat, seperti halnya golongan heteroseksual. Namun masyarakat pada umumnya belum dapat menyediakan ruang tersebut. Yang menarik dari penemuan Rahayu, Satriani, dan Mahaswara ini adalah, ditemukannya relasi kuasa antara seksualitas responden dengan orang tua mereka. Para responden yang semuanya adalah kaum *gay* ini merasa takut untuk mengakui status seksualitas mereka kepada orang tua mereka sendiri, atau mungkin juga keluarga besarnya. Penulis menganggap, pemikiran Foucault tentang relasi kuasa antara orang tua dan anak, yang dia sampaikan pada tulisannya tentang seks dan kekuasaan itu ada benarnya. Orang-orang tua, merasa memiliki kuasa atas tubuh anaknya, sehingga secara otomatis, merasa berhak untuk mengatur tubuh anaknya, termasuk juga seksualitas anaknya. Oleh karena itu, dalam akhir artikelnya Rahayu, Satriani, dan Mahaswara memberikan satu kesimpulan bahwa penegasan identitas di ranah publik yang tidak mudah untuk dilakukan oleh para gay ini, disalurkan dengan aplikasi yang memang menyediakan ruang bagi kebutuhan mereka akan berpasangan di tengah "kenormalan sosial". Ruang publik, yang diharapkan dapat menerima kaum *gay* ini, ternyata tidak dapat memberikan kenyamanan bagi mereka. Kehadiran ruang publik, yang dibentuk dengan persuasi dan konflik ini berada di antara negara dan pasar yang malah semakin memperuncing penolakan terhadap kehadiran mereka.

Pada era 1990-an, media masa juga ternyata memainkan peranan penting dalam masyarakat. Hal ini kemudian dianalisis oleh Fitri Meliya Sari (2016), yang memberikan anggapan bahwa norma sosial yang telah bertindak sebagai hakim agung itu, dikendalikan dan di-*framing* oleh media masa yang memegang kendali sang penguasa, utamanya dalam mengkonstruksi ulang pandangan masyarakat luas pada kelompok minoritas gender dan seksual.

Konstruksi akibat dari kekuasaan media ini secara tidak sadar telah menghilangkan hak-hak aksesibilitas kelompok ini pada lingkungan sosial, ekonomi, maupun politik mereka. Bagi penulis, terdapat banyak pihak yang berkuasa untuk menentukan kebenaran, kepantasan, dan kelayakan kaum *transgender*. Sebut saja ilmu hukum. Di Indonesia, UU No. 24 tahun 2003, dibingkai sebagai senjata untuk menolak perkawinan di luar laki-laki dan perempuan. Ketika media berkelindan dengan hukum, maka media masa bertugas untuk mengkonstruksi bahwa LGBT dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Artinya, media memang berperan untuk mengkonstruksi realitas LGBT itu sendiri. Seperti yang telah kita ketahui, media sendiri secara tidak langsung terbagi menjadi dua pandangan terhadap kaum minoritas seksual, termasuk *transgender*. Dominasi kaum anti-LGBT kemudian menciptakan kekerasan, baik di dunia nyata maupun maya. Penguasaan kaum anti-LGBT pada media masa ini mengakibatkan pengucilan, diskriminasi, dan *bullying* terhadap identitas yang mereka pegang atau miliki. Agar dapat memperjelas apa yang ditemukan oleh Sari, penulis pun memulai dengan mencari definisi dari identitas itu sendiri.

Menurut Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, dan John G. Oetzel (2012:75-76), identitas yang kita miliki akan selalu mengalami pembentukan, atau mungkin perubahan bentuk mengikuti respons atas konteks yang sedang kita alami. Hall (1996), dalam Littlejohn, Foss, dan Oetzel (2012:76) menyatakan, terdapat, paling tidak empat layer identitas, yaitu: *personal layer, enacturen layer, relational* (berkaitan dengan siapa diri kita), dan tingkat komunal. Menurut Stella Ting Toomey (1998), dari macam-macam identitas inilah, kemudian kita melihat adanya negosiasi identitas. Proses negosiasi ini tergantung dari posisi dan perkara untuk kita dapat merepresentasikan diri. Dalam masalah identitas, manusia diposisikan atau memposisikan diri mereka atau orang lain sebagai subjek. Jika kita melihat pemaparan Littlejohn, Foss, dan Oetzel di atas, kita dapat melihat bahwa identitas kita menempatkan diri atau posisi kita pada tempat dimana kita harus berdiri dan memainkan peran kita tersebut. Berangkat dari penjelasan tentang identitas tersebut, bagi kaum *transgender.* Menurut Judith Butler (2007:127), identitas yang terpinggirkan muncul bersamaan dengan operasi kuasa, dimana rezim identifikasi muncul bersamaan dengan kuasa. Identitas seksual

kita adalah sebuah produk yang dipaksakan oleh kekuasaan, yang dilakukan oleh negara atau masyarakat. Gender dan seksualitas adalah sebuah struktur imitatif, atau akibat dari proses imitasi, pengulangan, dan akibat dari performativitas. Artinya, jika saya laki-laki, maka saya harus berlaku seperti laki-laki. Anggapan inilah yang kemudian membuat kaum LGBT, terutama *transgender* harus menerima anggapan-anggapan negatif akibat ketidakjelasan gender mereka.

Akibat dari hal yang dijelaskan sebelumnya, media masa yang bekerjasama dengan penguasa berusaha untuk menilai benar-salah, layak-tidak layak, pantas-tidak pantas-nya suatu perilaku seksual, sesuai dengan norma-norma yang mereka pegang. Pendapat dan fakta yang disampaikan oleh Sari dengan didukung oleh berbagai sumber di atas, menunjukkan bahwa seksualitas seharusnya bukanlah sebuah atribut sosial. Ia memainkan peran personal, namun pengkategorian kultural kemudian bermain sebagai sebuah dampak dari kekuasaan. Hal ini sejalan dengan yang Foucault coba sampaikan pada hasil pikiran-pikirannya. Dalam kasus *transgender* yang diangkat oleh Sari misalnya, media masa yang menjadi mulut para penguasa rezim itulah yang menindas dan mencoba untuk mengendalikan para *transgender* untuk masuk ke ruang yang berada di luar normalitas tersebut.

KESIMPULAN:

Saat Tubuhku Bukan Lagi Menjadi Hal Privat

Foucault telah mencoba untuk menangkap hubungan relasi kuasa ini pada berbagai tulisannya, dan nampaknya pemikiran Foucault tentang relasi kuasa tersebut masih relevan dengan pembingkaian media dan ilmu pengetahuan terhadap tubuh sosial dan privat kelompok minoritas gender dan seksual. Relasi kuasa di antara kedua hal ini sangatlah jelas terlihat, dengan berbagai peristiwa, dan penelitian yang dilakukan di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir belakangan ini.

Berdasarkan pemikiran Michel Foucault tentang relasi tubuh dan kekuasaan, terdapat kenyataan-kenyataan yang muncul di hari-hari ini. Relasi tubuh dan kekuasaan yang diciptakan dan dikonstruksi oleh para penguasa di berbagai bidang, baik agama, sosial, politik, hukum, komunikasi dan masih banyak lagi bagi tubuh, yang seharusnya berada pada ranah privat, kemudian

terangkat pada ranah publik. Kekuasaan berbagai ilmu pengetahuan kemudian, menjejalkan pengertian-pengertian mereka untuk mendiskreditkan kelompok minoritas gender dan seksual. Yang menarik ialah, kekuasaan mereka menggunakan "tangan" media masa. Media masa seakan harus memberitakan berbagai pemikiran ilmu-ilmu pengetahuan yang memang secara konstruksi sosial sedang mendiskreditkan kelompok ini. Akibatnya, kelompok ini semakin tersingkir dan termarginalisasi dengan sebuah lingkaran setan antara media masa dengan ilmu pengetahuan yang memang dari awal telah menyingkirkan mereka tersebut dari istilah normativitas yang mereka percayai. Kelompok ini tidak lagi memiliki kuasa atas tubuh mereka. Konstruksi sosial yang dibangun di berbagai media masa, membuat mereka harus mengakui, bahwa mereka tidak lagi menjadi penguasa bagi tubuh sosial maupun tubuh privat mereka sendiri. Mereka dibatasi dengan pagar-pagar normativitas, yang membuat mereka dianggap sebagai orang yang abnormal, dan tidak mampu untuk diterima oleh konstruksi sosial secara umum itu.

DAFTAR PUSTAKA

Butler, Judith. *Gender Trouble: Feminism and The Subversion of Identity*. New York: Routledge, 1990.

Carrette, Jeremy R., ed. *Agama, Seksualitas, Kebudayaan: Esai, Kuliah, Dan Wawancara Terpilih Foucault*. Yogyakarta: Jalasutra, n.d.

Dharmastuti, Hestiana. "9 Fakta Geger Pesta Gay Di Kuningan Jaksel." *Detiknews*. September 3, 2020. https://news.detik.com/berita/d-5157631/9-fakta-geger-pesta-gay-di-kuningan-jaksel.

Foucault, Michel. *Arkeologi Pengetahuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.

———————. *Sejarah Seksualitas: Seks Dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

———————. *The Hermeneutics of Subject*. New York: Picador, 2001.

———————. *Tubuh Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.

Giamsjah, Surya Samudera. "Sola Iustitia: Dari Kota-Kota Perlindungan Sampai Memelihara Dan Melindungi Kehidupan Kaum Tertindas." In

Gereja Dan Persoalan-Persoalan Di Sekitar LGBT, edited by Asnath Niwa Natar, 229–38. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2020.

Halperin, David M. *Saint Foucault: Towards a Gay Hagiography*. Oxford: Oxford University Press, 1997.

Hardiman, F. Budi. *Melampaui Positivisme Dan Modernitas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003.

Littlejohn, Stephen W., Karen A. Foss, and John G. Oetzel. *Theories of Human Communication 11th Edition*. Illinois: Waveland Press Inc, 2017.

Natar, Asnath Niwa. "Pendampingan Pastoral Terhadap Kaum LGBTIQ Dan Keluarganya." In *Gereja Dan Persoalan-Persoalan Di Sekitar LGBT*, edited by Asnath Niwa Natar, 23–54. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen, 2020.

Ngahu, Silva S Thesalonika. "Menguak Prasangka Homoseksualitas Dalam Kisah Sodom Dan Gomora: Kajian Hermenutik Kejadian 19: 1-26." *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 4, no. 1 (2019): 17–30. https://doi.org/10.21460/gema.2019.41.406.

Nirwanto, Gisela Dea. "Pembingkaian Berita Pro Kontra LGBT Di Laman Topik Pilihan Kompas. Com." *Jurnal E-Komunikasi* 4, no. 1 (2016).

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. "Pernyataan Pastoral PGI Tentang LGBT." In *Menafsir LGBT Dengan Alkitab: Tanggapan Terhadap Pernyataan Pastoral PGI Mengenai LGBT*, edited by Emanuel Gerrit Singgih, 84–87. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.

Rahardjo, Wahyu. "Sikap Akan Respon Terhadap Identitas Sosial Negatif Dan Pengungkapan Orientasi Seks Pada Gay." *Jurnal Psikologi* 1, no. 1 (2011).

Rahayu, Puji, Rina Satriani, and Hamada Adzani Mahaswara. "Aplikasi Gay: Perjuangan Dan Ruang Negosiasi Identitas Bagi Kaum Gay Muda Di Yogyakarta." *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 2 (2014): 99–109. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32026.

Sari, Fitri Meliya. "Konstruksi Media Terhadap Transgender." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 3, no. 1 (2016): 25–34. https://doi.org/10.37676/professional.v3i1.290.

Sinaga, Hulman. "Memahami Dan Menyikapi LGBT Dari Perspektif Perjanjian Lama." In *Gereja & Persoalan-Persoalan Di Sekitar LGBT*, edited by Asnath Niwa Natar. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2020.

Toomey, Stella Ting. "Identity Negotiation Theory: Crossing Cultural Boundaries." In *Theory about Intercultural Communication*, edited by William B. Gudykunst, 211–34. California: Sage Publication, 2005.

Widyarsono, A. "Pendahuluan: Sekilas Mengenal Michel Foucault." In *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*, edited by P. Sunu Hardiyanta. Yogyakarta: LKiS, 1997.

Catatan Akhir

[1] Hestiana Dharmastuti, "9 Fakta Geger Pesta Gay Di Kuningan Jaksel," *Detiknews*, September 3, 2020, https://news.detik.com/berita/d-5157631/9-fakta-geger-pesta-gay-di-kuningan-jaksel.

[2] Penulis mengutip surat pastoral PGI ini dalam Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, "Pernyataan Pastoral PGI Tentang LGBT," in *Menafsir LGBT Dengan Alkitab: Tanggapan Terhadap Pernyataan Pastoral PGI Mengenai LGBT*, ed. Emanuel Gerrit Singgih (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 86.

[3] Michel Foucault, *The Hermeneutics of Subject* (New York: Picador, 2001), 504.

[4] Michel Foucault, *Tubuh Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), 70.

[5] David M. Halperin, *Saint Foucault: Towards a Gay Hagiography* (Oxford: Oxford University Press, 1997), 15.